

Nama : Suerna
NPM : 2313031081
Kelas : 23 C

UTS Ekonomi Publik

Soal 1

Pemerintah Kabupaten Arunika berencana membangun sistem penerangan jalan lingkungan di sebuah kawasan permukiman yang dihuni 1.200 keluarga. Lampu jalan akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan seluruh warga, tetapi pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran. Dalam sebuah forum warga, muncul tiga usulan:

- Usulan A: Seluruh biaya pembangunan ditanggung APBD.
- Usulan B: Biaya dibagi rata kepada seluruh keluarga melalui iuran bulanan.
- Usulan C: Pembangunan ditanggung APBD, tetapi biaya pemeliharaan dibebankan kepada warga melalui iuran.

Hasil wawancara pemerintah menunjukkan bahwa sebagian warga bersedia membayar karena merasa memperoleh manfaat, tetapi sebagian lainnya menyatakan, “Kalau lampunya sudah dipasang, saya tetap bisa menikmati manfaatnya meskipun tidak membayar.”

Pertanyaan:

1. Analisislah apakah penerangan jalan dalam kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai barang publik. Gunakan karakteristik barang publik dalam argumentasi Anda.
2. Jelaskan masalah free rider yang mungkin muncul dan mengapa mekanisme pasar tidak selalu menghasilkan penyediaan barang publik yang optimal.
3. Dari tiga alternatif kebijakan di atas, pilih satu kebijakan yang menurut Anda paling tepat. Jelaskan alasan ekonomi publik yang mendukung pilihan tersebut.
4. Kemukakan satu kelemahan dari kebijakan yang Anda pilih dan tawarkan cara untuk menguranginya

Jawaban:

1. Penerangan jalan lingkungan dapat dikategorikan sebagai barang publik karena memiliki dua karakteristik utama, yaitu non-rivalry dan non-excludability. Non-rivalry berarti penggunaan manfaat penerangan oleh satu keluarga tidak mengurangi manfaat yang diterima keluarga lainnya. Sementara itu, non-excludability berarti sulit membatasi warga tertentu agar tidak menikmati manfaat lampu jalan hanya karena mereka tidak membayar iuran. Dalam kasus

ini, lampu jalan memberikan manfaat keamanan dan kenyamanan bagi 1.200 keluarga secara bersamaan. Oleh karena itu, penerangan jalan termasuk barang publik, terutama apabila lampu dipasang untuk menerangi jalan yang dapat digunakan seluruh warga.

2. Masalah free rider terjadi ketika seseorang menikmati manfaat barang publik tanpa ikut membayar biaya penyediaannya. Dalam kasus ini, sebagian warga merasa tetap dapat menikmati penerangan jalan meskipun tidak membayar iuran. Kondisi tersebut membuat warga yang bersedia membayar mungkin menjadi lebih sedikit daripada jumlah warga yang menikmati manfaat. Akibatnya, penyedia swasta akan kesulitan memperoleh pendapatan yang cukup untuk membiayai pembangunan lampu jalan. Mekanisme pasar juga dapat menghasilkan penyediaan yang terlalu sedikit karena manfaat yang diterima masyarakat secara keseluruhan tidak sepenuhnya tercermin dalam kesediaan membayar setiap individu. Oleh sebab itu, pemerintah dapat berperan dalam menyediakan dan membiayai barang publik tersebut.
3. Menurut saya, Usulan C, yaitu pembangunan ditanggung APBD, sedangkan pemeliharaan dibantu melalui iuran warga, merupakan pilihan yang tepat dengan beberapa penyesuaian. Pembangunan lampu jalan membutuhkan biaya awal yang besar dan memberikan manfaat bagi seluruh warga. Karena itu, pembiayaan melalui APBD lebih sesuai untuk menjamin tersedianya penerangan jalan. Sementara itu, iuran pemeliharaan dapat membantu menjaga lampu tetap berfungsi dan mengurangi beban anggaran pemerintah. Namun, iuran pemeliharaan sebaiknya tidak menjadi syarat untuk menikmati penerangan jalan. Besar iuran perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga, dan pemerintah tetap harus memastikan pemeliharaan berjalan apabila penerimaan iuran tidak mencukupi.
4. Kelemahan Usulan C adalah kemungkinan sebagian warga tidak bersedia membayar iuran pemeliharaan karena merasa tetap dapat menikmati manfaatnya tanpa membayar. Hal tersebut dapat menyebabkan dana pemeliharaan tidak mencukupi. Untuk mengatasinya, pemerintah dapat melakukan musyawarah dengan warga, menetapkan iuran yang terjangkau dan transparan, serta menyediakan laporan penggunaan dana secara berkala. Pemerintah juga perlu menyiapkan dana cadangan APBD agar pemeliharaan lampu jalan tetap berjalan apabila iuran warga tidak mencukupi.

Soal 2

Di Kota Bening terdapat sungai yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan kegiatan ekonomi. Sebuah industri pengolahan makanan beroperasi di dekat sungai tersebut. Selama ini industri telah memenuhi izin lingkungan dan membayar pajak sebagaimana ditentukan pemerintah. Namun, hasil pengamatan masyarakat menunjukkan bahwa kualitas air sungai semakin menurun. Industri berpendapat bahwa penutupan atau pembatasan produksi akan mengurangi lapangan pekerjaan. Pemerintah sedang mempertimbangkan empat kebijakan:

- Mengenaikan pajak atas limbah yang dibuang ke sungai;
- Memberikan subsidi kepada perusahaan yang menggunakan teknologi pengolahan limbah;
- Menetapkan batas maksimum limbah dan memberikan sanksi jika dilanggar
- Membiarkan mekanisme pasar bekerja karena perusahaan telah membayar pajak dan memiliki izin usaha.

Pertanyaan:

1. Identifikasi eksternalitas dalam kasus tersebut. Siapa yang menghasilkan eksternalitas dan siapa yang menanggung dampaknya?
2. Jelaskan mengapa keberadaan eksternalitas dapat menyebabkan hasil pasar berbeda dari kondisi yang dianggap efisien secara sosial.
3. Bandingkan dua instrumen kebijakan dari empat alternatif di atas. Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing.
4. Anda adalah penasihat ekonomi pemerintah. Pilih satu instrumen yang paling tepat untuk kasus tersebut. Jangan hanya menjelaskan teori; buatlah argumentasi berdasarkan kondisi kasus.
5. Bayangkan perusahaan menyatakan bahwa kebijakan pemerintah akan menyebabkan biaya produksi naik dan harga produk meningkat. Apakah argumen tersebut otomatis berarti kebijakan pemerintah tidak tepat? Jelaskan.

Jawaban:

1. Kasus tersebut menunjukkan adanya eksternalitas negatif, yaitu dampak merugikan dari kegiatan ekonomi terhadap pihak lain yang tidak sepenuhnya tercermin dalam biaya produksi perusahaan. Industri pengolahan makanan merupakan pihak yang menghasilkan eksternalitas melalui pembuangan limbah ke sungai. Sementara itu, masyarakat yang menggunakan air sungai untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan kegiatan ekonomi menanggung

dampaknya. Penurunan kualitas air dapat meningkatkan biaya pengolahan air, mengganggu kegiatan pertanian, dan mengurangi kesejahteraan masyarakat.

2. Eksternalitas negatif menyebabkan perusahaan tidak menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan produksinya. Perusahaan mungkin hanya memperhitungkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional, tetapi tidak sepenuhnya memperhitungkan kerugian masyarakat akibat pencemaran sungai. Akibatnya, biaya produksi yang ditanggung perusahaan lebih rendah daripada biaya sosial yang sebenarnya. Hal ini dapat mendorong perusahaan memproduksi barang dalam jumlah lebih besar daripada tingkat yang efisien secara sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi agar biaya pencemaran ikut diperhitungkan dalam keputusan produksi perusahaan.
3. Saya memilih membandingkan pajak limbah dan batas maksimum limbah disertai sanksi. Pajak atas limbah memiliki kelebihan karena mendorong perusahaan mengurangi pencemaran dengan mempertimbangkan biaya pajak yang harus dibayar. Perusahaan juga memiliki fleksibilitas untuk memilih teknologi atau cara pengurangan limbah yang paling hemat biaya. Kekurangannya, jika tarif pajak terlalu rendah, perusahaan mungkin tetap memilih membayar pajak daripada mengurangi pencemaran. Batas maksimum limbah dan sanksi memiliki kelebihan karena pemerintah dapat menetapkan batas pencemaran yang harus dipatuhi perusahaan. Kebijakan ini cocok ketika kualitas air perlu dilindungi dari pencemaran yang berlebihan. Kekurangannya, pengawasan membutuhkan biaya dan tenaga, serta perusahaan mungkin perlu mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, pajak memberikan fleksibilitas ekonomi, sedangkan batas maksimum memberikan kepastian mengenai tingkat pencemaran yang diperbolehkan.
4. Saya memilih membandingkan pajak limbah dan batas maksimum limbah disertai sanksi. Pajak atas limbah memiliki kelebihan karena mendorong perusahaan mengurangi pencemaran dengan mempertimbangkan biaya pajak yang harus dibayar. Perusahaan juga memiliki fleksibilitas untuk memilih teknologi atau cara pengurangan limbah yang paling hemat biaya. Kekurangannya, jika tarif pajak terlalu rendah, perusahaan mungkin tetap memilih membayar pajak daripada mengurangi pencemaran. Batas maksimum limbah dan sanksi memiliki kelebihan karena pemerintah dapat menetapkan batas pencemaran yang harus dipatuhi perusahaan. Kebijakan ini cocok ketika kualitas air perlu dilindungi dari pencemaran yang berlebihan. Kekurangannya, pengawasan membutuhkan biaya dan tenaga, serta perusahaan mungkin perlu mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, pajak memberikan fleksibilitas ekonomi, sedangkan batas

maksimum memberikan kepastian mengenai tingkat pencemaran yang diperbolehkan.

5. Tidak. Kenaikan biaya produksi dan harga produk tidak otomatis berarti kebijakan pemerintah salah. Kebijakan lingkungan memang dapat meningkatkan biaya yang harus ditanggung perusahaan, tetapi biaya tersebut diperlukan untuk mengurangi kerugian yang sebelumnya ditanggung masyarakat akibat pencemaran. Dalam ekonomi publik, kebijakan perlu dinilai dengan membandingkan biaya dan manfaat sosialnya, bukan hanya berdasarkan keuntungan perusahaan. Jika penurunan pencemaran menghasilkan manfaat kesehatan, lingkungan, dan ekonomi yang lebih besar daripada biaya penerapan kebijakan, maka kebijakan tersebut tetap layak dilakukan. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pekerja dan konsumen. Bantuan transisi teknologi, pendampingan bagi perusahaan, dan penerapan kebijakan secara bertahap dapat membantu mengurangi dampak negatif tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan.

Soal 3

Pemerintah daerah X mengalami penurunan penerimaan sehingga harus mencari tambahan pendapatan sebesar Rp100 miliar per tahun. Pemerintah mempertimbangkan tiga pilihan:

Alternatif 1: menaikkan pajak konsumsi.

Alternatif 2: menaikkan pajak atas kelompok berpendapatan tinggi.

Alternatif 3: mengenakan pungutan khusus atas penggunaan kendaraan pribadi di pusat kota.

Data sederhana yang tersedia:

Kelompok	Pendapatan rata-rata/bulan	Proporsi penduduk	Proporsi konsumsi
Pendapatan rendah	Rp3.000.000,-	40%	30%
Pendapatan menengah	Rp.8.000.000,-	45%	45%
Pendapatan tinggi	Rp.25.000.000,-	15%	25%

Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan yang dipilih harus memenuhi dua tujuan: menambah penerimaan negara/daerah dan tetap memperhatikan keadilan ekonomi.

Pertanyaan:

1. Berdasarkan data tersebut, jelaskan alternatif mana yang berpotensi paling regresif dan mana yang berpotensi lebih progresif. Jelaskan logika Anda, bukan hanya definisinya.
2. Apakah pajak yang paling adil selalu merupakan pajak yang paling efisien? Jelaskan dengan menggunakan konsep equity dan efficiency.
3. Jika Anda menjadi pengambil keputusan, alternatif mana yang akan Anda pilih? Anda tidak wajib memilih alternatif yang menurut Anda paling adil, tetapi harus mampu mempertanggungjawabkan pilihan tersebut.
4. Buatlah satu desain kebijakan alternatif dengan menggabungkan atau memodifikasi ketiga pilihan tersebut agar tujuan penerimaan dan keadilan dapat lebih seimbang.
5. Identifikasi satu kelompok masyarakat yang kemungkinan dirugikan oleh desain kebijakan Anda dan jelaskan bagaimana pemerintah dapat mengurangi dampak tersebut.

Jawaban:

1. Menurut saya, pajak konsumsi berpotensi paling regresif, sedangkan pajak atas kelompok berpendapatan tinggi berpotensi lebih progresif. Pajak konsumsi berpotensi regresif karena masyarakat berpendapatan rendah umumnya memiliki ruang keuangan yang lebih terbatas. Sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga pajak atas barang konsumsi dapat mengambil bagian yang relatif besar dari pendapatan mereka. Sebaliknya, kenaikan pajak atas kelompok berpendapatan tinggi dapat lebih progresif karena beban pajak diarahkan kepada kelompok yang memiliki kemampuan membayar lebih besar. Hal ini dapat mendukung keadilan distribusi pendapatan. Berdasarkan data soal, kelompok berpendapatan rendah mencakup 40% penduduk dengan proporsi konsumsi 30%, sedangkan kelompok berpendapatan tinggi mencakup 15% penduduk dengan proporsi konsumsi 25%. Data tersebut menunjukkan perbedaan pola konsumsi antarkelompok, tetapi belum cukup untuk menghitung secara pasti tingkat regresivitas pajak. Untuk itu, diperlukan informasi mengenai besarnya pajak yang dibayar dibandingkan dengan pendapatan masing-masing kelompok. Sementara itu, pungutan kendaraan pribadi di pusat kota dapat menjadi pilihan yang lebih terarah karena dikenakan kepada pengguna fasilitas jalan tertentu. Namun, keadilannya tetap bergantung pada kemampuan membayar dan ketersediaan transportasi umum.
2. Tidak selalu. Dalam ekonomi publik, equity berarti keadilan dalam pembagian beban pajak, sedangkan efficiency berarti kemampuan kebijakan mencapai tujuannya dengan penggunaan sumber daya yang baik dan distorsi ekonomi yang minimal. Pajak yang progresif dapat meningkatkan keadilan karena

kelompok berpendapatan tinggi menanggung beban lebih besar. Namun, jika tarifnya terlalu tinggi, pajak tersebut dapat memengaruhi keputusan bekerja, berinvestasi, atau menjalankan usaha. Sebaliknya, pajak konsumsi relatif mudah diterapkan dan dapat menghasilkan penerimaan yang luas, tetapi berpotensi membebani masyarakat berpendapatan rendah secara tidak proporsional. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan keadilan dan efisiensi. Pajak yang baik bukan hanya mampu menghasilkan penerimaan, tetapi juga memperhatikan kemampuan membayar, dampak terhadap kegiatan ekonomi, serta biaya administrasinya.

3. Saya memilih alternatif 2, yaitu menaikkan pajak atas kelompok berpendapatan tinggi, dengan tetap mempertimbangkan besarnya tarif dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi. Alasannya, pemerintah membutuhkan tambahan penerimaan sebesar Rp100 miliar per tahun sekaligus harus memperhatikan keadilan ekonomi. Kelompok berpendapatan tinggi secara umum memiliki kemampuan membayar yang lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan rendah. Kebijakan ini dapat membantu pemerintah meningkatkan penerimaan tanpa langsung menambah beban pajak konsumsi bagi seluruh masyarakat. Namun, pemerintah harus menetapkan tarif secara wajar agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi yang berlebihan. Sebelum diterapkan, pemerintah juga perlu memperkirakan potensi penerimaan agar target Rp100 miliar dapat tercapai.
4. Saya mengusulkan kebijakan gabungan berupa kenaikan pajak yang terukur bagi kelompok berpendapatan tinggi, pungutan kendaraan pribadi di pusat kota, serta perlindungan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Pajak kelompok berpendapatan tinggi menjadi sumber utama tambahan penerimaan. Pungutan kendaraan pribadi diterapkan secara terarah untuk penggunaan kendaraan di kawasan pusat kota, terutama ketika kemacetan tinggi. Sementara itu, pajak konsumsi umum tidak perlu dinaikkan secara luas agar kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah tidak semakin terbebani. Penerimaan yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan meningkatkan transportasi umum. Sebelum diterapkan, pemerintah perlu menghitung potensi penerimaan dari setiap instrumen untuk memastikan totalnya mampu memenuhi kebutuhan tambahan Rp100 miliar per tahun. Desain tersebut berusaha menggabungkan keadilan dan efisiensi: beban lebih diarahkan kepada kelompok yang memiliki kemampuan membayar atau penggunaan fasilitas tertentu, sementara pelayanan publik ditingkatkan bagi masyarakat luas.

5. Kelompok yang berpotensi dirugikan adalah pekerja berpendapatan menengah yang harus menggunakan kendaraan pribadi untuk bekerja di pusat kota karena keterbatasan transportasi umum. Pungutan kendaraan dapat meningkatkan biaya perjalanan mereka, meskipun pendapatannya tidak tergolong tinggi. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah dapat memperbaiki layanan transportasi umum, menyediakan tarif yang terjangkau, dan mempertimbangkan pengecualian atau keringanan secara terbatas bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, kebijakan tetap dapat menghasilkan penerimaan dan mengelola penggunaan kendaraan di pusat kota tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat yang memiliki alternatif transportasi terbatas.